



LAPORAN
Pelaksanaan FORUM KONSULTASI PUBLIK
“REVIU STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN”

13 Mei 2024

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi	i
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	2
3. Metode Pelaksanaan FKP	2
4. Susunan Acara FKP	3
C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	3
1. Identifikasi Masalah	3
2. Analisis	3
3. Rencana Aksi	5
D. PENUTUP	6

Lampiran I Berita Acara yang Ditandatangani

Lampiran II Dokumentasi Salinan Daftar Hadir

Lampiran III Surat Undangan

Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan

Lampiran V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2022

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP

merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada BBPOM di Banjarmasin.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

- 1). Sebagai wadah komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan penerima layanan.
- 2). Menampung aspirasi, saran dan tanggapan masyarakat serta *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan oleh BBPOM di Banjarmasin.
- 3). Menghasilkan produk layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Manfaat

1). Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2). Penyelenggara Pelayanan

- memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;

- sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3). Publik

- ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. RUANG LINGKUP

Riviu Standar Pelayanan Publik

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tanggal : 13 Mei 2024
 Hari : Senin
 Tempat : Grand Qin Hotel Banjarbaru

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara : BBPOM di Banjarmasin

Peserta : unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, lintas sektor, perwakilan ombudsman, akademisi, media, dan pengguna layanan (pelaku usaha, kepolisian, masyarakat umum).

3. Metode Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan secara tatap muka.

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

WAKTU (WITA)	MATERI	PELAKSANA
08.15 – 09.00	Registrasi peserta	Panitia
09.00 – 09.45	Pembukaan : - Lagu Indonesia Raya - Sambutan dan pembukaan - Doa - Foto Bersama	Panitia
09.45 – 10.00	<i>Coffee break</i> - Pemutaran Video Inovasi Pelayanan Publik - Pemutaran Video Standar Pelayanan Publik	Panitia
10.00 – 11.00	Materi 1 : Riviui Standar Pelayanan Publik	Kepala BBPOM di Banjarmasin
11.00 – 12.00	Materi 2 : Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik di Provinsi Kal-Sel	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan
12.00– 12.30	Diskusi	Narasumber
12.30 – 13.00	- Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP - Penutupan	Perwakilan Peserta, Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

- Edukasi Obat dan Makanan lebih ditingkatkan agar pemberitaan terkait BBPOM di Banjarmasin menyebar luas ke masyarakat umum.
- Peredaran narkotika di Kota Banjarbaru mengalami kenaikan.
- Perlu pembinaan terhadap klinik kecantikan yang banyak bermunculan di Kota Banjarbaru

2. Analisis Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, analisis masalah dalam pelayanan publik di BBPOM di Banjarmasin adalah belum optimalnya edukasi Obat dan Makanan yang terkait dengan pemberitaan di berbagai media kepada Masyarakat luas; masih banyak ditemukan peredaran narkotika khususnya di Kota Banjarbaru; serta perlunya pembinaan terhadap klinik kecantikan yang banyak bermunculan.

Hasil kegiatan FKP :

- a. Materi yang disampaikan Kepala BBPOM di Banjarmasin adalah terkait Reviu Standar Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin tahun 2023. Standar Pelayanan Publik untuk 8 (delapan) pelayanan dinilai masih relevan, yaitu :

- (1) Layanan Pengaduan Masyarakat dan informasi Obat dan Makanan,
- (2) Layanan Pengujia Obat dan Makanan
- (3) Layanan Izin Penerapan CPPOB

(4) Layanan Sertifikasi CDOB

(5) Layanan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan A

(6) Layanan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan B

(7) Layanan Sertifikat Pemenuhan aspek CPOTB Secara Bertahap

(8) Layanan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika.

Dari hasil diskusi, terdapat pertanyaan dan saran peserta yang tidak berhubungan langsung dengan standar layanan, namun dapat berfungsi sebagai pendukung dalam peningkatan pelayanan publik. Sehingga, Standar Pelayanan BBPOM di Banjarmasin belum mengalami perubahan dan masih memberlakukan Standar Pelayanan tahun 2023.

- b. Materi yang disampaikan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik di Provinsi Kal-Sel. Pada Sesi ini Ombudsman memantau pelaksanaan pelayanan publik pada instansi penyelenggara pelayanan publik, termasuk BBPOM di Banjarmasin.
- c. Ditayangkan juga video profil BBPOM di Banjarmasin yang memuat tupoksi dan penerapan RB dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- d. Disampaikan juga beberapa inovasi pelayanan publik yaitu (1). Kelotok Laboratorium Keliling (Kerling) berupa sampling dan pengujian pangan serta pemberian informasi keamanan pangan

di sekitar sungai Kota Banjarmasin dan Kab. Banjar; (2). BBPOM di Banjarmasin berpartisipasi dan memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Barokah Martapura; (3). Ganii UMKM, sebagai wadah bagi UKM untuk mendapatkan informasi tata cara perizinan Obat dan Makanan dan mendapat pembinaan serta pengawalan langsung dari petugas jika telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin edar BPOM.

Hasil Diskusi :

✓ Respon positif dari lintas sektor :

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru : terkait perizinan PIRT melalui OSS, masyarakat masih menanyakan hal ini ke BPOM dan ditanggapi dengan baik oleh petugas layanan dengan memberi penjelasan secara detil, walaupun izin PIRT ada di lingkup Pemda Kabupaten/Kota.
- Kepolisian : memberikan apresiasi terhadap penyelesaian waktu uji sampel napza menjadi 1 (satu) hari
- Media Banjarmasin Post : cepat dalam memberikan tanggapan jika awak media ingin penjelasan terkait isu obat dan makanan.

✓ Tanggapan peserta :

- Anggota DPRD : seiring dengan perubahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, hendaknya BBPOM di Banjarmasin menyesuaikan nomenklatur.
- BNN Kota Banjarbaru : untuk menurunkan angka peredaran narkoba, jika stakeholder memiliki gagasan/inovasi terkait hal ini dapat disampaikan kepada BNN Kota Banjarbaru.

3. Rencana Aksi

- 1). Akan ditingkatkan pemberitaan Obat dan Makanan di media sosial, media elektronik dan media digital.
- 2) Fungsi Penindakan dan Fungsi Pemeriksaan BBPOM di Banjarmasin akan bekerjasama dalam pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kota Banjarbaru.
- 3). Akan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan klinik kecantikan

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Reviu Standar Pelayanan Publik, maka BBPOM di Banjarmasin berkomitmen untuk :

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
2. Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
3. Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan reviu terhadap standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

BERITA ACARA
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

Pada hari ini, Senin, 13 Mei 2024, bertempat di Grand Qin Hotel Banjarbaru telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

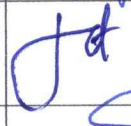
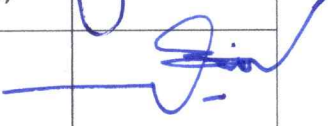
NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Peredaran narkoba di Kota Banjarbaru mengalami kenaikan	Fungsi Penindakan dan Fungsi Pemeriksaan BBPOM di banjarmasin akan bekerjasama dalam pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kota Banjarbaru.	Desember 2024
2.	Edukasi Obat dan Makanan lebih ditingkatkan agar pemeberitaan terkait BBPOM di Banjarmasin menyebar luas ke masyarakat umum.	Akan lebih ditingkatkan pemberitaan di media sosial, media elektronik dan media digital.	Desember 2024
3	Perlu pembinaan terhadap klinik kecantikan yang banyak bermunculan di Kota Banjarbaru	Akan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan klinik kecantikan	Desember 2024

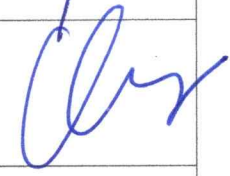
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

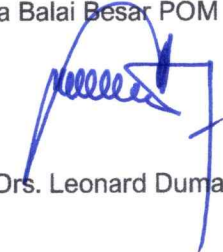
Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 13 Mei 2024

No	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Benny Sanjaya, S.H., M.H	087815159789	L	Ombusman Republik Indonesia Prov Kalsel	
2.	H. Taufikurrahman, SH	081330577695	L	DPRD Kota Banjarbaru (Tokoh Masyarakat)	
3	AKBP Arif Wahyu Bibitharta, S.H, M.H., M.M.	081352308308	L	Kepala BNN Kota Banjarbaru (Stakeholder)	

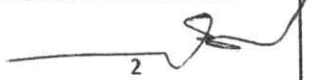
4	Abdul Malik Ibrahahim, S.STP., M.Ec.Dev	08115128318	L	Kepala UPT Pengelola Pasar Banjarbaru (Stakeholder)	
6.	Rezwendy	085880207191	L	APJ PT. Sarigading Pusaka Kalimantan (Pengguna Layanan)	
7.	Difa Intannia	081938391954	P	Prodi Pendidikan Profesi Apoteker FMIPA ULM (Akademisi)	
8.	Sarah Yudea L. Toruan	087734556595	P	Polres Banjarbaru (Pengguna Layanan)	

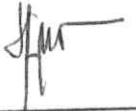
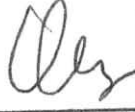
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin,

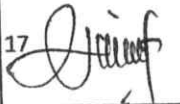
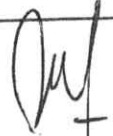


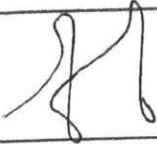
Drs. Leonard Duma, Apt., MM

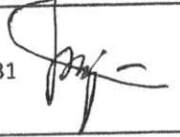
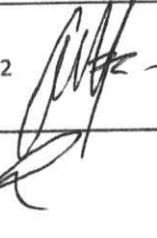
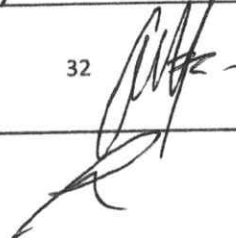
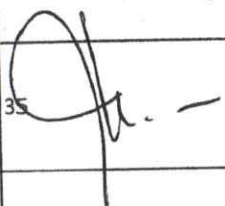
DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK DI KOTA BANJARBARU
13 Mei 2024

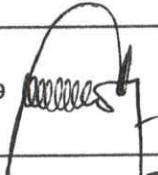
No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
1	Dra. Supiani Obrang Ruswati, M.Pd	P	BPMP Kalsel	Widyaprada Ahli Muda	081348049613	¹ 
2	AKBP ARIF WB,SH,MH	P	BNNK DJB	Kepala BNN	081352308308	² 
3	Bambang S	L	DPMPTSP	Kepala Dinas	081352148876	³ 
4	Agustini A	P	Diskaminfo	Kasi SOPPP Humas	082154123223	⁴ 

no	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
5	Amir Syarifudin	L	Kwarcab Bjb	Sekretaris	081254065401	5 
6	Yuniar Ayu Handayani	P	DBPOM Banjarmasin	PFM Ahli Madya	081255029022	6 
7	ERY PUJA UTAMA	L	Kelurahan Mentass	RT.01	081357556138	7 
8	Rensondy	L	PT. Brigady Puskas Kalimantan	APJ	085880207191	8 
9	Susakbati .A	P	Children Study Club Banjarbaru	Pembina	081251309439	9 
10	Sarah Yudea	P	POLRES BJB	KANIT I SATRESKAM	08773455659	10 
11	Yenni Lestari	P	TP-PKK Kota Bjb	Sekretaris II	087815242573	11 
12	Fitriana D-R	P	LPP KRI Banjarmasin	Reporter	085851868700	12 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
13	INDRAYADI	L	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU	KABID PEMBINAAN SD	085705934399	13 
14	Fannia Damara Z	P	Apotek Zhafren	APT	08972461212	14 
15	Lahpah	P	BBPOM	Staf	085101311328	15 
16	Novi Wibanti	P	BBPOM di Bangarmasin	PFM Ahli Pertama	082134344455	16 
17	DPA MTANNIA	P	UNIV. LAMBUNG MANGK RAT	Ka. Prodi Apoteker	081938391954	17 
18	Ag-Rita Fitriani	P	Dinas Kes. Kota Bjb	Kabid Kesmas	085251064467	18 
19	W. Wren. Rohaty	P	DKP3 Bjb	Kabid Ketel. Pajm	081255551755	19 
20	Rujalonor	L	Ombudsman Kalsel	Akster	085332554441	20 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
21	apt. Mia Fitriana, M. si	P	PC IAS BANGBARU	KETUA	081952729164	21 
22	Strawati	P	PT. PEK	MP	081346759746	22 
23	Tih Naulati T.F	P	RSD AMAN	PA. INS RM	081827655564	23 
24	Martiana	P	KIP Kalor	Anggota	082157838757	24 
25	Bambang Heng P	L	BBPOM Bjm	Katim	08575422020	25 
26	Adi Hidayat	L	BBPOM Bp.	DFM AM	082153005308	26 
27	TRAFIK KEMAHMASH	L	DPKD AM	~~Anggota~~ Komisi 1	081330577699	27 
28	Ezhimadi	L	BPOST	Wartawan	082251493149	28 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
29	M. Pidha Anshari	L	Diras Perindustrian Prov. Kalsel	Prakom Ahli Pertama seksi PDII	0852 2556 0944	29 
30	Iyamsari	L	DPRD Bangor	wk ketua Komisi II	0812506 6177	30 
31	H. Nuo Syahid Ramli	L	MUI Banjarbaru	Ketua	085105194631	31 
32	Alfianor	L	Kemenag BJB	Pangreh.	081392760911	32 
33	Rasya	L	TURV	Rednetw	08453458183	33 
34	Laily Khairiyati	P.	PSKM FKIK ULM	Kaprodi	081254428900	34 
35	Malik Ibrahaim	L	UPT. Pasar BJB	Kepala	08115128318	35 
36	Haliza Endraswati	P	BEPAN Banjarmasin	Kabag	08170788281	36 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
37	Aris	L	TRC	Perencanaan	085759 844120	37 
38	Luthfi Rssi	L	BBPOM Banjarmasin	Praktis Komputer	0815 4583 3889	38 
39	Dr. Leonard Puma, Apt. MM	L	BBPOM Banjarmasin	Ka Balai	-	39 
40	TEGUH	L	Diskominfa	Star	082151234467	40 
41	Benny Sansaya, S.H., M.H	L	Ombudsman RI Prov Kaltel	Kepala Keasistenan Pencapaian mal	0878 1515 9789	41 
42	Gusti Maulita	P	BBPOM 4-54	PFM Ahli May.	08125549795J	42 
43	Hj. Rahzani	P	BBPOM BJM	PFM Ahli Muda	0813 4963 21 25	43 
44	Anita Rahayu	P	BBPOM BJM	PFM Ahli pertama	082151936845	44 

No	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI	JABATAN	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
45	M. Ridho. A.Md	L	BBPOW Bym	stat.		45 

Mengetahui,
Ketua Tim Informasi dan Komunikasi



Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt.
NIP.19750405 200003 2 001

Nomor : B-HM.02.04.17A.05.24.204
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Peserta Forum Konsultasi Publik

Banjarmasin, 2 Mei 2024

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di Tempat

Dalam rangka sosialisasi standar pelayanan dan menampung saran/masukan dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Banjarmasin akan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada :

Hari/tanggal : Senin/13 Mei 2024
Waktu : 08.30 – 13.00 WITA
Tempat : Grand Qin Hotel Banjarbaru
Jl. A. Yani KM 38,6 Qmall Banjarbaru

Sehubungan dengan kegiatan di atas, dimohon kesediaan Bapak/Ibu Kepala/Pimpinan atau yang mewakili untuk dapat berhadir sebagai peserta aktif kegiatan Forum Konsultasi Publik. Konfirmasi kehadiran melalui biodata terlampir dapat dikirimkan ke nomor *Whatsapp* layanan BBPOM di Banjarmasin 085245004884, paling lambat 7 Mei 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin



Drs. Leonard Duma, Apt., M.M

LAMPIRAN

SURAT DINAS KEPALA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

NOMOR : B-HM.02.04.17A.05.24.

TANGGAL : 2 Mei 2024

JADWAL
FORUM KONSULTASI PUBLIK
13 MEI 2024

WAKTU (WITA)	KEGIATAN	KETERANGAN
08.15 – 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.45	Pembukaan : - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Arahan dan Pembukaan Acara - Doa - Foto Bersama	Panitia
09.45 – 10.00	<i>Coffee break</i>	Panitia
10.00 – 11.00	Materi 1 : Reviu Standar Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin	Kepala BBPOM di Banjarmasin
11.00 – 12.00	Materi 2 : Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Publik di Provinsi Kal-Sel	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan
12.00 – 12.30	Diskusi	Panitia
12.30 – 13.00	- Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik - Penutupan	Panitia

LAMPIRAN

SURAT DINAS KEPALA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

NOMOR : B-HM.02.04.17A.05.24.

TANGGAL : 2 Mei 2024

DAFTAR UNDANGAN

A. STAKEHOLDER

1. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru
5. Kepala DPM-PTSP Kota Banjarbaru
6. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
8. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru
10. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan
11. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru
12. Direktur RSD Idaman Banjarbaru
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
14. Kepala UPT Pasar Idaman Banjarbaru
15. Lurah Guntung Paikat
16. Lurah Komet

B. PELAKU USAHA

1. Pimpinan PT. Sarigading
2. Pimpinan CV. Astagina
3. Pimpinan PT. Panen Embun Kemakmuran
4. Pimpinan Apotek Zafran

C. ORGANISASI PROFESI/MASYARAKAT

1. Ketua PC IAI Banjarbaru
2. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Banjarbaru
3. Ketua TP PKK Kota Banjarbaru

D. MEDIA

1. Banjarmasin Post
2. TVRI Kalimantan Selatan
3. RRI Banjarmasin

E. AKADEMISI

1. Koordinator Prodi Kesehatan Masyarakat FKIK ULM
2. Ketua Prodi Pendidikan Profesi Apoteker FMIPA ULM

F. TOKOH MASYARAKAT

1. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru
2. Ketua MUI Kota Banjarbaru

G. PENGGUNA LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN/MASYARAKAT UMUM

1. Pembina Children Study Club Banjarbaru

H. PENYELENGGARA LAYANAN BBPOM DI BANJARMASIN

1. Kepala BBPOM di Banjarmasin
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. PFM Ahli Madya Fungsi Pengujian
4. PFM Ahli Madya Fungsi Pemeriksaan
5. PFM Ahli Madya Fungsi Penindakan
6. PFM Ahli Muda Fungsi Sertifikasi
7. PFM Ahli Muda Fungsi Pengujian
8. PFM Ahli Muda Fungsi Infokom

LAMPIRAN

SURAT DINAS KEPALA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

NOMOR : B-HM.02.04.17A.05.24.

TANGGAL : 2 Mei 2024

BIODATA PESERTA

FORUM KONSULTASI PUBLIK

BBPOM DI BANJARMASIN

SENIN/ 13 MEI 2024

Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Instansi/Organisasi	:	
Jabatan	:	
Nomor Hp	:	

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembacaan Doa



Pemateri Kepala BBPOM di Banjarmasin



Penanya dari Anggota DPRD Kota Banjarbaru



Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP



Peserta FKP BBPOM di Banjarmasin 2024



LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

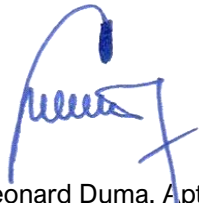
Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin yang telah ditandatangani pada 14 Juni 2023. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Sesuai PerBPOM No. 28 tahun 2022, standar pelayanan di lingkungan UPT terdiri atas 8 layanan, sehingga perlu dilakukan reviu terhadap standar pelayanan BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 yang masih memuat 3 layanan.	Akan disusun dan ditetapkan 8 (delapan) standar pelayanan	Bentuk Tindak Lanjut: Menyusun 8 (delapan) standar pelayanan sesuai PerBPOM 28/2022.	Standar pelayanan BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 hanya terdiri dari 3 layanan, sehingga pada FKP 2023 dilakukan reviu dan hasilnya adalah penyusunan dan penetapan standar baru yaitu 8 standar pelayanan sesuai dengan layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.
			Waktu Pelaksanaan: Juni 2023	
			Rencana Aksi/ Keterangan: Telah ditetapkan 8 standar pelayanan yaitu Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan, Layanan Pengujian Obat dan Makanan, Layanan Izin Penerapan CPPOB, Layanan Sertifikasi CDOB, Layanan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan A, Layanan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan B, Layanan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap, Layanan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.	
2.	Masyarakat ada yang belum mengetahui tentang standar pelayanan public BBPOM di Banjarmasin.	Standar pelayanan akan dipublikasikan melalui media sosial, media cetak dan baliho untuk menjangkau lapisan masyarakat luas.	Bentuk Tindak Lanjut: Mendesain materi standar pelayanan yang akan dipublikasikan di media sosial, media cetak dan baliho.	-
			Waktu Pelaksanaan: Desember 2023	
			Rencana Aksi/ Keterangan:	

			Telah dipublikasikan standar pelayanan di media sosial, media cetak dan baliho.	
3.	Respon positif terhadap pelayanan BBPOM di Banjarmasin akan menjadi supporting dalam peningkatan pelayanan public.	Akan dilakukan peningkatan kompetensi petugas layanan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi	Bentuk Tindak Lanjut: Membuat perencanaan peningkatan kompetensi bagi petugas layanan. Waktu Pelaksanaan : Desember 2023 Rencana Aksi/Keterangan : Petugas layanan telah mengikuti pelatihan teknis terkait pelayanan pyblik.	Petugas layanan akan selalu ditingkatkan kompetensinya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 13 Juni 2024

Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik  Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt	Kepala BBPOM di Banjarmasin  Drs. Leonard Duma, Apt., MM
---	---